



Saatnya Negara Berdaulat di Laut

Koordinasi Lintas Sektoral dalam Mendukung Pembangunan Kemaritiman

PPRA LIII Lemhannas-RI

Ged. Panca Gatra Lemhannas-Jakarta, 4 Mei 2015



 **Dadang Solihin**



Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA in Economics dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll.

Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 LAN-RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI yang dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha.

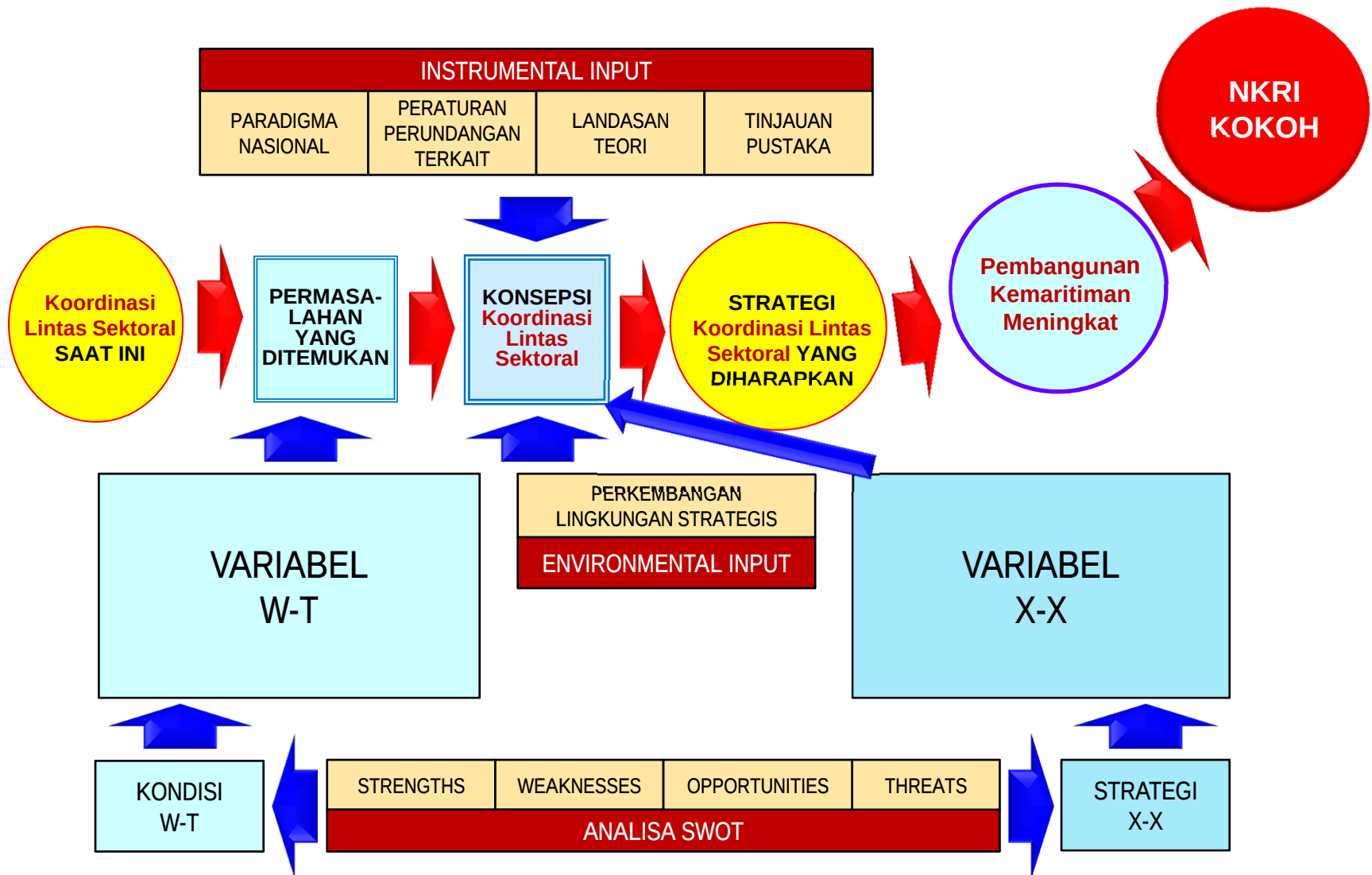
Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Silahkan email dadangsol@gmail.com HP 08129322202 web: <http://dadang-solihin.blogspot.com>

Materi

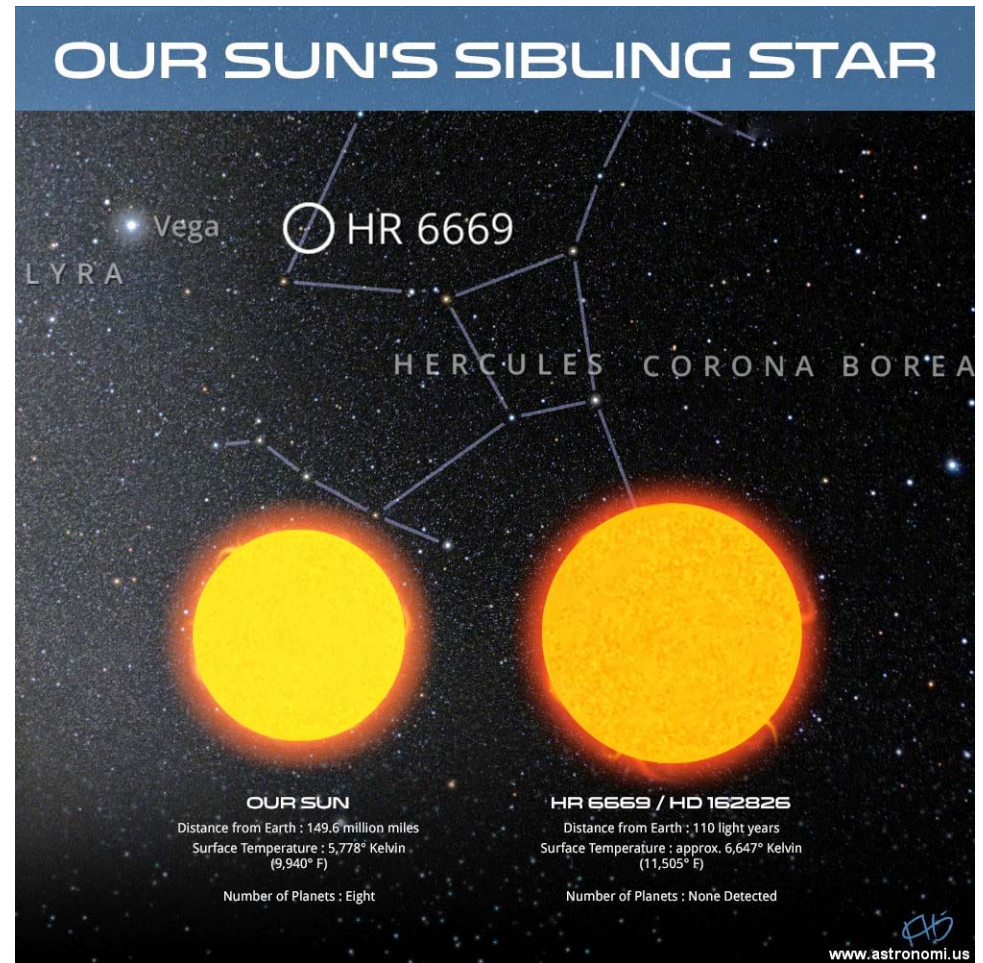
- Alur Pikir
- *What is Coordination?*
- Permasalahan Kemaritiman
- Sistem Manajemen Nasional (Sismennas)
- Kerangka Kelembagaan
- Arah Kebijakan dan sasaran Kemaritiman RPJMN 2015-2019
- **Simulasi Penyusunan KSU dengan Analisa SWOT**



ALUR PIKIR Koordinasi Lintas Sektoral dalam Mendukung Pembangunan Kemaritiman



What is Coordination?





coordination



Web

Images

Books

Videos

Maps

More ▾

Search tools

About 609,000,000 results (0.57 seconds)

co·or·di·na·tion

/kō,ōrdn'āSH(ə)n/

noun

1. the organization of the different elements of a complex body or activity so as to enable them to work together effectively.
"both countries agreed to intensify efforts at economic policy coordination"
2. the ability to use different parts of the body together smoothly and efficiently.
"changing from one foot position to another requires coordination and balance"

Translations, word origin, and more definitions

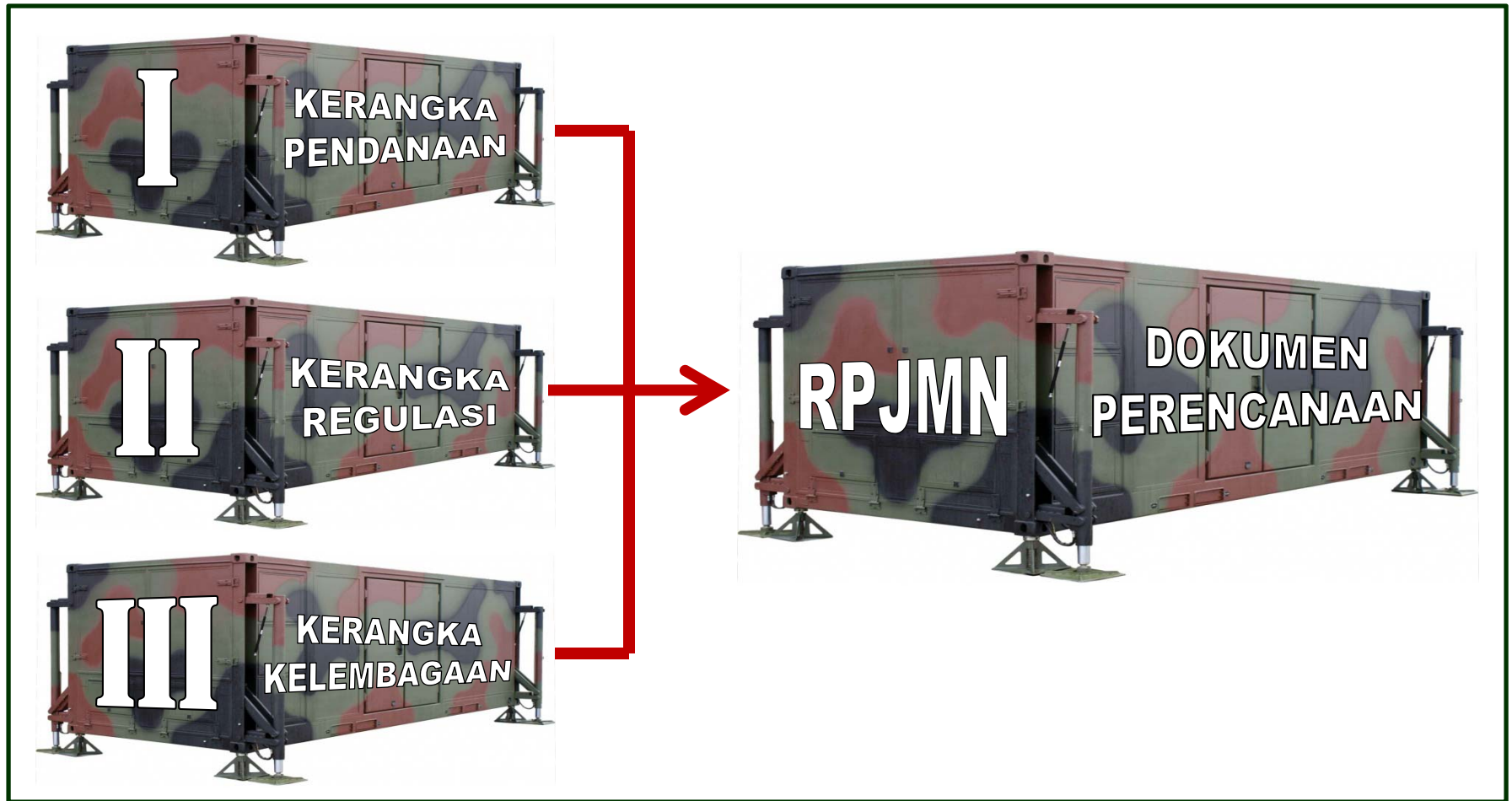
Coordination - Wikipedia, the free encyclopedia

en.wikipedia.org/wiki/Coordination ▾

Coordination is the act of organizing, making different people or things work together for a goal or effect to fulfill desired goals in an organization. Coordination is ...

Coordination game - Motor coordination - Coordination number

What Equipment are Needed for Coordination?



Permasalahan Kemaritiman





“Untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, kuat, makmur, dan damai yang merupakan *Nation Building* bagi negara Indonesia maka NEGARA DAPAT MENJADI KUAT JIKA DAPAT MENGUASAI LAUTAN”.

SOEKARNO, dikutip
oleh Menko Kemaritiman
Indroyono Soesilo

- Persatuan Indonesia dan integrasi ekonomi yang utuh dari negeri kepulauan ini hanya dapat dicapai melalui reformasi logistik maritim yang menyeluruh,
- TANPA REFORMASI TERSEBUT, INDONESIA HANYALAH KUMPULAN PULAU-PULAU, BUKAN NEGARA KEPULAUAN.

R.J. LINO
Direktur Utama PT Pelindo II



Masalah Perikanan

1. Usaha perikanan cenderung stagnan

- Didominasi oleh nelayan kecil dan pembudidaya ikan tradisional, yaitu kapal motor dan kapal penangkap ikan di bawah 5 GT.
- Kepemilikan lahan usaha budidaya masih rata-rata di bawah 1 ha.

2. Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sulit menerapkan prinsip-prinsip perikanan yang bertanggungjawab (*responsible fisheries*)

- Belum dilengkapi struktur dan mekanisme pengelolaan
- Belum memiliki tata kelola perikanan yang baik (*good fisheries management*),

3. Maraknya ***Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing***, yang dilakukan oleh kapal perikanan Indonesia (KII) maupun oleh kapal perikanan asing (KIA).

Masalah Perikanan

- 4. Industri pengolahan perikanan masih didominasi oleh industri pengolahan skala mikro dan kecil.**
- Komposisi industri/unit pengolahan ikan (UPI) skala mikro mencapai hampir 95% dari industri pengolahan perikanan yang ada (sekitar 60 ribu unit UPI).
 - Produk perikanan pada umumnya masih dipasarkan dalam bentuk primer, berupa penggaraman/pengeringan, pemindangan, dan pengasapan/pemanggang.
 - Komoditas rumput laut, yang merupakan salah satu produk terbesar budidaya, mayoritas dijual dalam bentuk bahan baku olahan yang dikeringkan.
 - Lokus industri pengolahan perikanan masih terkonsentrasi di Jawa sementara sumber daya perikanan berada di luar Jawa.
 - Kurang memadainya sarana dan prasarana terkait sistem logistik perikanan, termasuk transportasi, sehingga distribusi produk perikanan kurang efisien.

Masalah Tata Kelola Laut

1. Penataan ruang laut masih lemah.

- Baru 5 provinsi, 7 kabupaten dan 5 kota yang telah menetapkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui peraturan daerah.

2. Pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar belum optimal.

- Keterbatasan sarana prasarana dasar, berupa listrik, air, telekomunikasi,
- Keterbatasan sarana prasarana pengembangan ekonomi
- kurang memadainya jumlah kapal dan rute penghubung antarpulau kecil dan antara pulau kecil dengan pulau besar.
- Pendataan, pemetaan, penamaan pulau-pulau kecil serta pelaporan ke PBB harus diselesaikan sampai dengan tahun 2017.

Masalah Tata Kelola Laut

3. Kurangnya pengelolaan kawasan konservasi secara efektif.
 - Baru sekitar 3,6 juta ha dari 20 juta ha yang telah dikelola secara efektif.
4. Kurangnya upaya peningkatan ketahanan wilayah pesisir terhadap erosi, abrasi, dan pencemaran.
5. Belum optimalnya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan.
6. Belum terbangunnya secara utuh kelembagaan pendidikan dan pelatihan Kelautan.
7. Kurang berperannya inovasi dan pengembangan IPTEK tepat guna dalam pembangunan kelautan dan perikanan.

Masalah Transportasi Laut

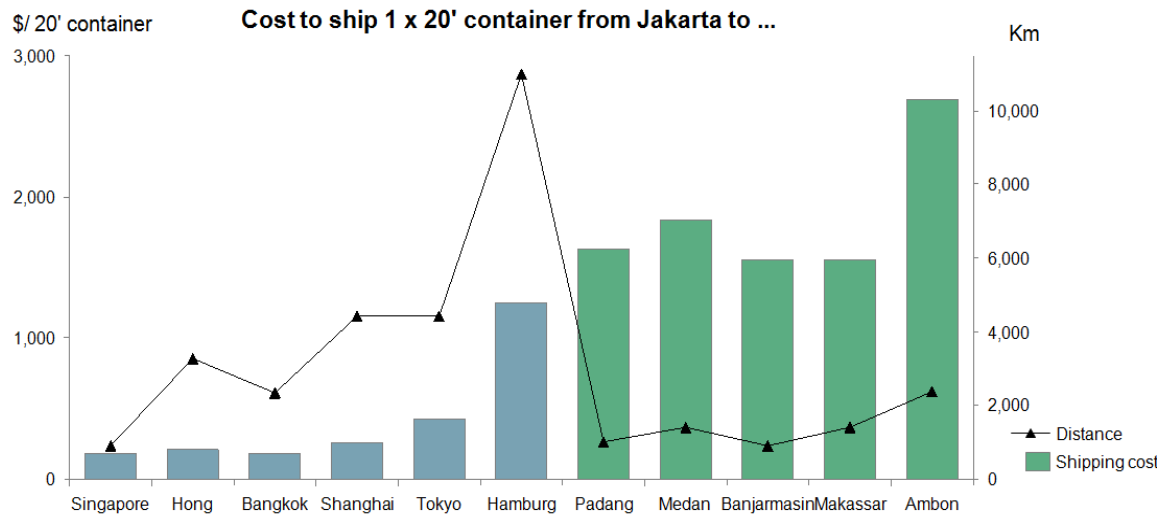
1. Keterpurukan peran armada pelayaran nasional.

- Sekitar 50% dari angkutan kargo domestik sudah berusia lebih dari 25 tahun,
- Biaya ekonomi yang tinggi menyebabkan turunnya minat pengguna transportasi laut,
- Kurangnya fasilitas prasarana bongkar muat di pelabuhan.

2. Tidak efisiennya pengangkutan barang yang diangkut terutama untuk angkutan laut ke Indonesia bagian timur.

- Angkutan laut dari Pulau Jawa ke Papua terisi penuh, namun kembali dalam keadaan kosong.
- Salah satu penyebabnya adalah karena wilayah di timur Indonesia tersebut sangat langka akan pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi.
- Hal ini menyebabkan biaya logistik yang dibebankan kepada komoditi menjadi tinggi.

Logistic Cost yang Tinggi untuk Distribusi Barang ke Indonesia Timur

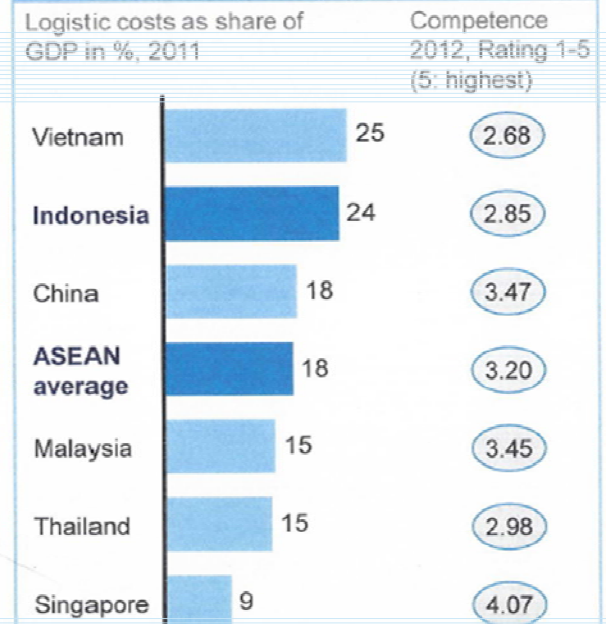


Lebih murah pengiriman barang dari Jakarta ke Hamburg (11.000 km) daripada dari Jakarta ke Padang (1.000 km)

Source: Quotes from domestic logistic company, 2012

Sumber: RJ Lino, 2014

Logistics cost and competence 2012



Source: McKinsey Study

Masalah Kawasan Perbatasan

- **Keterisolasian kawasan perbatasan negara,**
 - Minimnya akses ke kawasan perbatasan karena minimnya APBN dan APBD untuk pembangunan kecamatan perbatasan yang lokasinya terpencil dan terluar.
- **Belum ada sistem** untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan baik industri maupun perdagangan berbasis potensi sumber daya kawasan perbatasan, serta menjamin pemberdayaan masyarakat perbatasan;
- **Adanya *overlapping claim areas*** segmen-segmen batas wilayah negara Indonesia dengan negara tetangga;
- **Masih lemahnya pengamanan batas wilayah laut, darat, dan udara** di kawasan perbatasan negara;
- **Kurang terintegrasinya pengelolaan dan pembangunan** kawasan perbatasan negara dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Masalah Pos Perbatasan

- Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan belum menyentuh seluruh wilayah perbatasan dan pulau terluar.
- Belum optimalnya pengamanan terhadap pulau kecil terluar di P. Berhala, P. Nipah, P. Laut, P. Enggano, P. Karimata, P. Serutu, P. Maratua, P. Derawan, P. Sebatik, P. Miangas, P. Marore, P. Marampit, P. Batek, P. Mangudu, P. Dana (Kep. Rote), P. Dana (Kep. Sabu), P. Lirang, P. Wetar, P. Kisar, P. Marotai, P. Fani, P. Bras, P. Rondo, P. Nasi, P. Bengkaru, dan P. Haloban.
- Perlu peningkatan pembangunan pos-pos pengamanan perbatasan dan gelar pasukan TNI secara terbatas di pulau-pulau kecil terluar dalam rangka menjamin kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.



TANJUNG DATUK

Potensi Konflik Maritim

- Dalam perspektif geostrategis, perbatasan laut Indonesia memiliki peran penting bagi penguasaan dan pemanfaatan potensi laut, yaitu:
 - potensi sumber daya yang dapat diperbaharui,
 - potensi sumber daya tidak dapat diperbaharui,
 - potensi sumber energi, maupun
 - potensi strategis.
- Potensi-potensi yang dimiliki perbatasan laut inilah yang mengundang potensi konflik maritim.
- Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memang tidak terlibat secara langsung di dalam konflik Laut China Selatan, namun hal tersebut secara langsung dapat mempengaruhi geopolitik Indonesia.

Nine-Dotted Line

- Klaim teritorial China yang disebut "*nine-dotted line*", yaitu garis demarkasi yang digunakan China dan Taiwan untuk menunjuk klaim mereka di Laut China Selatan, menjangkau dan tumpang tindih dengan ZEE Indonesia di Laut Natuna.
- Dilihat dari segi hukum internasional, peta Laut China Selatan yang dibuat oleh Cina tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982.
- *Nine-dotted line* telah diprotes tidak hanya oleh Indonesia, namun juga Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei.



Permasalahan Regulasi dan Institusi

- Permasalahan **regulasi** dan **institusi** menyebabkan belum optimalnya penanganan pelanggaran kelembagaan hukum di laut.
- **Secara regulasi**, pengelolaan laut belum dilaksanakan dalam satu koridor regulasi yang komprehensif dan konsisten. Pada saat ini ada 13 K/L penegak hukum di laut dengan kewenangan yang berbeda-beda.
 - Dari ke-13 K/L tersebut hanya TNI AL, Polri (Dit Polair), Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubla), Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), Kementerian Keuangan (Ditjen Bea Cukai), dan Bakorkamla yang memiliki Satuan Tugas Patroli di laut dengan jumlah total kapal patroli sebanyak 923 kapal.
 - Jumlah ini cukup besar, namun pengoperasiannya masih berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan tupoksi masing-masing lembaga, kurang optimal karena permasalahan ego sektoral belum sepenuhnya terselesaikan.

Permasalahan Regulasi dan Institusi



- **Secara institusi**, revitalisasi BAKORKAMLA menjadi BAKAMLA perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai, termasuk peningkatan kapasitas peralatan surveillance, agar permasalahan keselamatan dan keamanan di laut dapat diatasi secara optimal.

Permasalahan Koordinasi



Bagaimana Kerangka Kelembagaannya?



Sistem Manajemen Nasional (Sismennas)



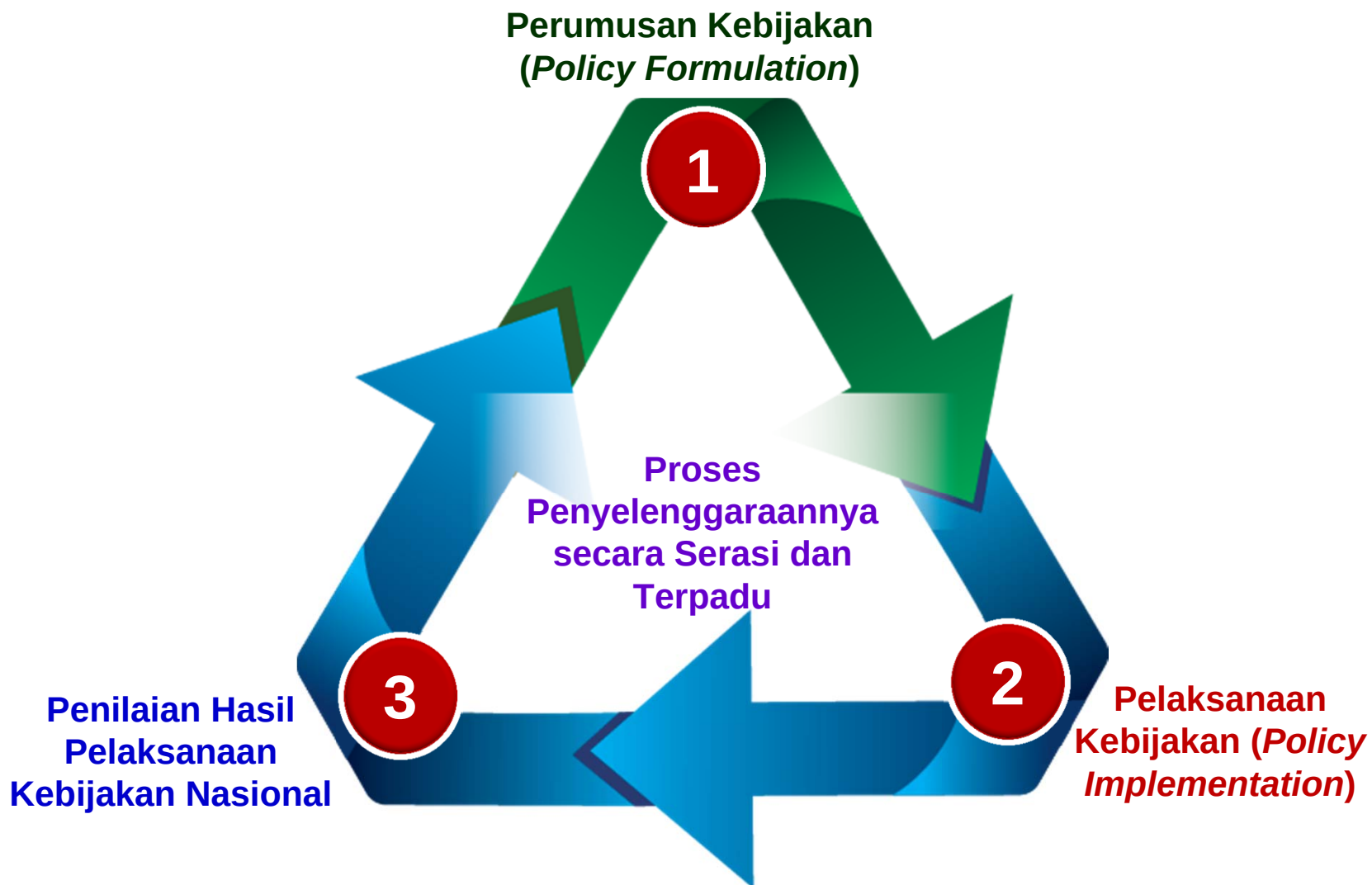
Apa itu Sismennas?



Sismennas adalah

- Perpaduan tata nilai, struktur, fungsi, dan proses,
- Yang merupakan himpunan usaha untuk mencapai kehematan, daya guna dan hasil guna sebesar mungkin,
- Dalam menggunakan sumber daya dan dana nasional,
- Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

Siklus Sismennas



Siklus Manajemen Pembangunan



Landasan Sismennas

1. **Pancasila**, sebagai landasan falsafati;
2. **UUD 1945** sebagai landasan konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
3. **Wawasan Nusantara** sebagai landasan visional yang mengandung nilai-nilai persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan negara;
4. **Ketahanan Nasional** sebagai landasan konsepsional dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keamanan;
5. **Landasan operasional** yang dalam perjalanan sejarah NKRI berkembang sesuai dengan kepentingannya, yaitu:
 - Nawaksara saat kepemimpinan Presiden Soekarno,
 - GBHN saat kepemimpinan Presiden Suharto,
 - RPJPN 2005—2025,
 - RPJMN 2005—2009 dan RPJMN 2010—2014 saat kepemimpinan Presiden SBY.
 - RPJMN 2015—2019 saat kepemimpinan Presiden JKW.

Orientasi Sismennas

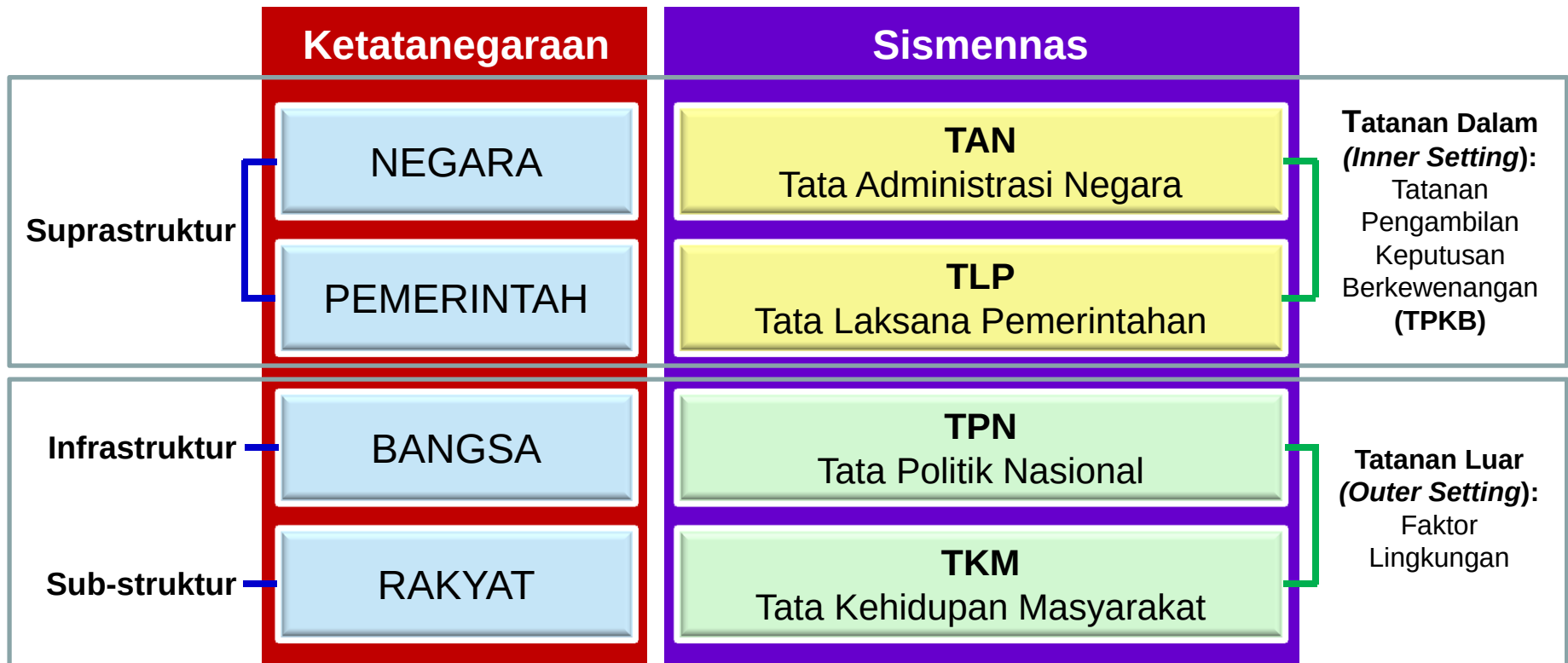


1. Mengembangkan wawasan strategik;
2. Membangun keterpaduan dan kerja sama:
 - antarlembaga,
 - antarbidang,
 - antarsektor,
 - antarwilayah, dan
 - antarpemerintah dengan masyarakat;
3. Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab (*Good Governance*);
4. Menerapkan metodologi dan teknik manajemen secara tepat guna.

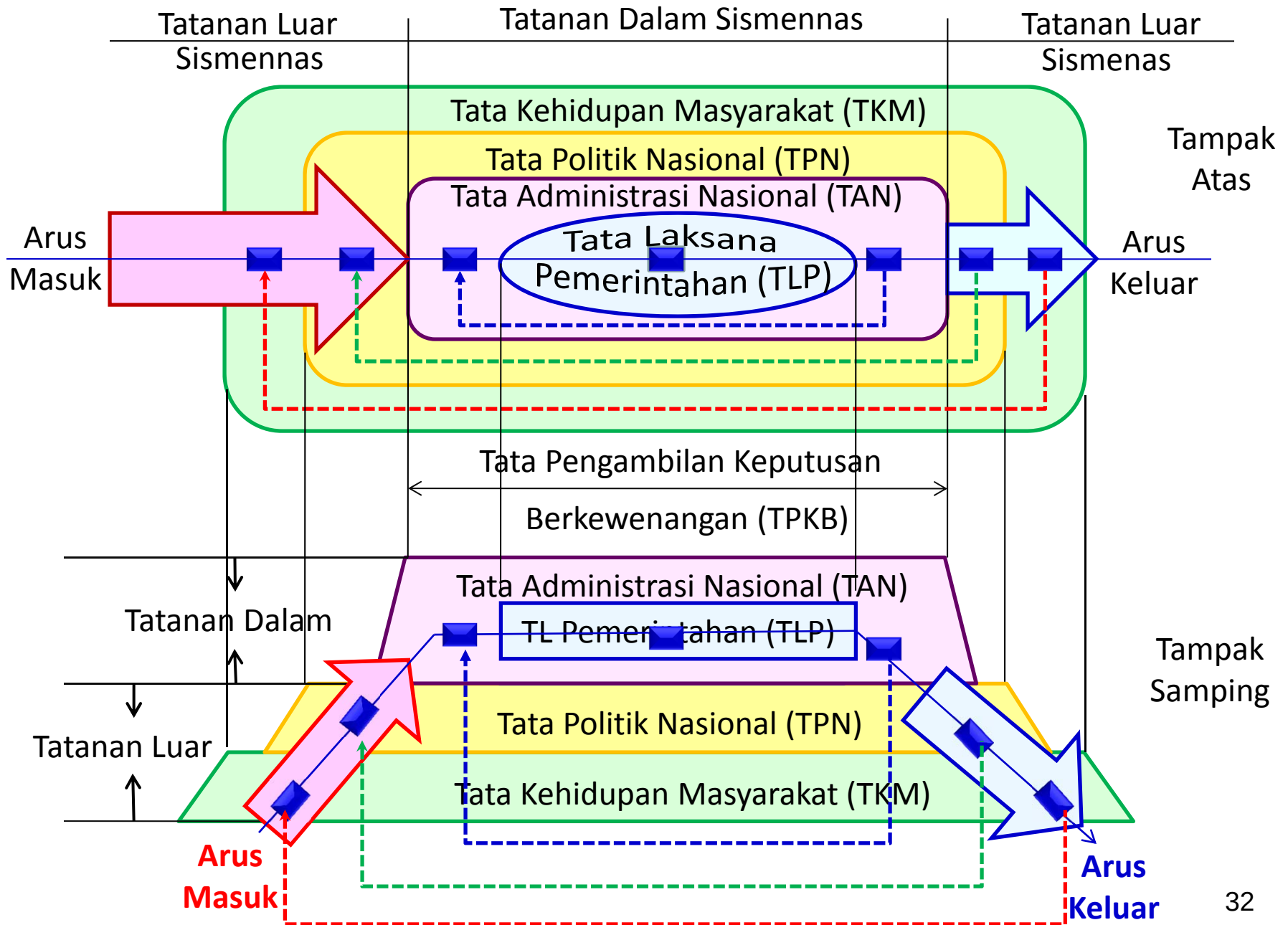
Konsep Dasar Sismennas

- **Sistem** adalah suatu totalitas yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan (interrelasi), saling keterpaduan (interaksi), saling ketergantungan (interdependensi) yang secara sinergi bersama-sama mengemban fungsi tertentu.
- **Manajemen** adalah pengelolaan atau tata laksana yang merupakan proses, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur **perencanaan**, pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian atas setiap pemanfaatan sumber daya dan sumber dana secara hemat, efektif, dan efisien untuk mencapai tujuan yang tepat guna.
- **Nasional** adalah seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehidupan bermasyarakat melingkupi berbagai aspek kehidupan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terkandung makna bahwa setiap komponen bangsa sadar akan hak dan kewajiban juga berperan serta dalam membangun dan membela negara.

Tatanan Sismennas



Struktur Sismennas



Tata Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB)

- Mentransformasikan berbagai masukan yang bersifat politis (aspek kehidupan bangsa) ke dalam bentuk administratif (program dan kegiatan)
 1. **Perencanaan** dilaksanakan sebagai rintisan dan persiapan sebelum pelaksanaan sesuai dengan kebijakan yang dirumuskan.
 2. **Pengendalian** dilaksanakan sebagai arahan, bimbingan, dan koordinasi selama pelaksanaan.
 3. **Penilaian** dilaksanakan untuk membandingkan hasil pelaksanaan dengan keinginan setelah pelaksanaan selesai.
- Seluruh keputusan dan kebijakan dari tiga fungsi TPKB tersebut lebih lanjut secara strategis, manajerial, dan operasional dituangkan dalam berbagai hierarki perundang-undangan dan peraturan sesuai dengan kepentingan dan klasifikasinya serta dikeluarkan oleh instansi atau pejabat terkait yang diwenangkan.

Struktur RPJMN 2015-2019

VISI:

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong

7 MISI

NAWACITA

9 Agenda Prioritas

TRISAKTI

**Berdaulat dalam
Bidang Politik**

- 12 Program Aksi
- 115 Prioritas Utama

**Berdikari dalam
Bidang Ekonomi**

- 16 Program Aksi

**Berkepribadian dalam
Bidang Kebudayaan**

- 3 Program Aksi

Misi Pembangunan

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, **menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim**, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan **memperkuat jati diri sebagai negara maritim**.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. **Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.**
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

9 Agenda Prioritas - NAWACITA

1. Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya
3. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan
4. Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia
6. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional
7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik
8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa
9. Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia

Menuju Indonesia yang Jauh Lebih Baik

1. Mengejar peningkatan daya saing,
2. Meningkatkan kualitas manusia termasuk melalui pembangunan mental,
- 3. Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor maritim dan kelautan,**
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang kuat dan berkualitas,
5. Mengurangi ketimpangan antarwilayah,
6. Memulihkan kerusakan lingkungan,
7. Memajukan kehidupan bermasyarakat.



Strategi Pembangunan Nasional

NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA

- 1) Membangun untuk manusia dan masyarakat;
- 2) Upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar;
- 3) Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan.
- 4) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem

3 DIMENSI PEMBANGUNAN

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

Pendidikan

Kesehatan

Perumahan

Mental / Karakter

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi &
Ketenagalistrikan

Kemaritiman dan Kelautan

Pariwisata dan Industri

DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN

Antarkelompok
Pendapatan

Antarwilayah:

- (1) Desa,
- (2) Pinggiran,
- (3) Luar Jawa,
- (4) Kawasan Timur

KONDISI PERLU

Kepastian dan
Penegakan Hukum

Keamanan dan
Ketertiban

Politik & Demokrasi

Tata Kelola & RB

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

Dimensi Pembangunan

- Koordinasi Perencanaan Multi-Sektor dan Multi K/L/D terhadap masing-masing **Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA)** meliputi:
 1. Kedaulatan Pangan
 2. Kedaulatan Energi
 - 3. Kemaritiman**
 4. Industri/Kawasan Industri
 5. Pariwisata
 6. Revolusi Mental
 7. Kawasan Perbatasan.



Kerangka Kelembagaan

**Sumber: Buku I RPJMN 2015-2019,
Bab 7 Kaidah Pelaksanaan**

Pengertian dan Ruang Lingkup

- **Kelembagaan** merujuk kepada organisasi, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta SDM aparatur.
- **Organisasi** mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur.
- **Pengaturan hubungan** inter dan antar-organisasi mencakup aturan main dan/atau tata hubungan kerja inter dan antar-organisasi/ lembaga pemerintah.
- **SDM aparatur** negara mencakup para pejabat negara dan aparatur sipil negara yang menjalankan organisasi tersebut.



Organisasi/Lembaga Pemerintah

1. Lembaga-lembaga negara, yang terdiri dari MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK sebagaimana diatur dalam UUD-NRI1945 dan peraturan-perundangan terkait;
2. Kementerian negara dan lembaga pemerintah non kementerian sebagaimana diatur di dalam UU 39/2008 tentang Kementerian Negara;
3. Lembaga Non Struktural yang dibentuk atas perintah undang-undang, seperti KPK, Ombudsman RI, Komnas HAM, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan lain-lain;
4. Pemerintah Daerah beserta satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk sesuai dengan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan perundangan lainnya.

Di luar lembaga-lembaga tersebut, dalam rangka memperkuat dan memperlancar pelaksanaan pembangunan, Pemerintah dapat membentuk lembaga-lembaga yang memiliki fungsi koordinasi seperti: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN), dan lain-lain.

Tata Hubungan Kerja antar Lembaga Pemerintah

1. Diatur di dalam peraturan-perundangan tertentu. Misalnya:
 - a. Tata hubungan kerja antara KPK, Polri, dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi diatur di dalam UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - b. Tata hubungan kerja antara Kementerian Keuangan, Kementerian PPN, dan K/L dalam perencanaan dan penganggaran diatur di dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, beserta peraturan turunannya;

Tata Hubungan Kerja antar Lembaga Pemerintah

2. Diatur dalam bentuk pembentukan **Tim Koordinasi**,
 - seperti misalnya tata hubungan kerja pengelolaan reformasi birokrasi nasional antara:
 - Kantor Wakil Presiden,
 - Kementerian PAN dan RB,
 - Kementerian Keuangan,
 - Kementerian Dalam Negeri,
 - Kementerian PPN,
 - Sekretariat Negara,
 - Sekretariat Kabinet, dan lain-lain
 - dilakukan dengan pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN);

Tata Hubungan Kerja antar Lembaga Pemerintah

3. Diatur dalam bentuk penetapan **Nota Kesepahaman Bersama** (MoU) di antara beberapa lembaga pemerintah yang saling terkait untuk saling mendukung dalam melaksanakan program/kegiatan yang memiliki saling keterkaitan yang sangat erat.
 - Hal ini misalnya dilakukan oleh
 - Kementerian Perindustrian,
 - Kementerian Perdagangan, dan
 - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
 - dalam mendorong penguatan Gerakan Nasional Gemar Produk Indonesia.

Aspek sumber daya manusia aparatur di dalam isu kerangka kelembagaan mencakup jumlah dan kualitas, yang meliputi pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan sikap (attitude).

Sasaran

- Penguatan kerangka kelembagaan pemerintah dimaksudkan untuk mewujudkan kelembagaan pemerintah yang
 - efektif,
 - efisien,
 - akuntabel, dan
 - sinergis
- agar mampu melaksanakan program-program pembangunan dengan efektif dan efisien.



Arah Kebijakan dan Strategi

- Pelaksanaan program pembangunan pada umumnya akan memanfaatkan kelembagaan pemerintah yang sudah ada, seperti lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, dan lembaga non-struktural.
- **Apabila diperlukan, dapat dibentuk institusi koordinasi** untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang bersifat lintas sektor, lintas K/L, dan/atau lintas daerah.



Upaya Penguatan Kelembagaan Pemerintah

1. Penguatan koordinasi antar instansi yang terkait dengan fungsi penataan kelembagaan instansi pemerintah, yang dikoordinasikan oleh kementerian yang membidangi pendayagunaan aparatur negara;
2. Penataan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga pemerintah untuk menghindari multi-tafsir dan duplikasi fungsi, serta benturan kewenangan;
3. Penyederhanaan struktur baik secara horizontal maupun vertikal untuk mengurangi fragmentasi organisasi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
4. Penyempurnaan bisnis proses inter maupun antar lembaga agar tercipta tata laksana pemerintahan dan pembangunan yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif, dan efisien;
5. Penyediaan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi lembaganya dengan baik;
6. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan

Penguatan kelembagaan pemerintah juga dilakukan dengan memperhatikan tiga hal:

1. **Kebijakan pembangunan**, yang meliputi sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan, untuk memastikan bahwa kelembagaan pemerintah yang diperkuat dan/atau dibentuk sejalan dan mendukung pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel;
2. **Peraturan perundangan yang berlaku**, termasuk peraturan perundangan tentang desentralisasi dan otonomi daerah, untuk memastikan keserasian antara tugas, fungsi, dan kewenangan setiap lembaga dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; dan
3. **Transparan, efektif, dan efisien**, untuk memastikan bahwa hasil penataan kelembagaan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, analisis biaya dan manfaat dalam penataan kelembagaan perlu dilakukan dengan cermat.

Prioritas Penguatan Kerangka Kelembagaan 2015-2019

Penguatan kerangka kelembagaan pemerintah difokuskan untuk mendukung pencapaian agenda prioritas pemerintah yang tertuang dalam NAWA CITA.



7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik,



e. Penguatan koordinasi dalam pembangunan kelautan guna meningkatkan keterpaduan dan efektivitas kebijakan pembangunan kelautan yang bersifat lintas sektor;

Arah Kebijakan dan Sasaran Kemaritiman RPJMN 2015-2019



Arah Kebijakan

1. Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan pulau2 dan pendaftarannya;
2. Pengaturan dan pengendalian ALKI;
3. Penguatan lembaga pengawasan laut;
4. Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana;
5. Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda;
6. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;
7. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan;
8. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut;
9. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan Iptek kelautan;
10. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir

INDIKATOR	2014 (Baseline)	2019
Memperkuat Jatidiri sebagai negara Maritim		
▪ Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB	13.466	17.466 (Selesai 2017)
▪ Penyelesaian batas maritim antar negara	1 negara	9 negara
Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar		
• Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan	52%	87%
Membangun Konektivitas Nasional:		
▪ Pengembangan pelabuhan untuk menunjang tol laut	--	24
▪ Pengembangan pelabuhan penyeberangan	210	270
▪ Pembangunan kapal perintis	50 unit	104 unit
Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan		
▪ Produksi hasil perikanan (juta ton)	22,4	40-50
▪ Pengembangan pelabuhan perikanan	21 unit	24 unit
▪ Peningkatan luas kawasan konservasi laut	15,7 juta ha	20 juta ha

Sasaran 2019 dan Target 2016

No	Sasaran Nawacita hingga 2019	Target 2016
1.	Pemberian akses modal, sarpro, infrastruktur, teknologi dan pasar	Pembangunan 200 kampung nelayan, 17 technopark
2.	Pembangunan 100 sentra perikanan	20 sentra perikanan terpadu
3.	Pengembangan dan Pembangunan 24 pelabuhan perikanan strategis	Pengembangan 22 pelabuhan perikanan UPT Pusat
4.	Pemberantasan illegal, unregulated, unreported fishing	45,33% luasan cakupan pengawasan perairan dari IUU fishing dan keg. yang merusak SDKP
5.	Keamanan laut, daerah perbatasan	Pengawasan dan patroli perairan
6.	Pengamanan SDA dan ZEE	
7.	Penurunan intensitas penangkapan di kawasan overfishing	Pengawasan dan Pengelolaan WPP
8.	Kawasan konservasi perairan berkelanjutan 20 juta ha	Pengelolaan 17,1 juta ha luasan kawasan konservasi dan penambahan luas kawasan konservasi 700 ribu ha
9.	Penambahan kawasan konservasi 700.000 ha	
10.	Rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir	55 kawasan pesisir yang direhabilitasi
11.	<i>Best aqua-culture practices</i> untuk komoditas unggulan	20 kawasan yang didukung sarana perikanan budidaya; 24 lokasi pengembangan teknologi anjuran; 36 sentra kebun bibit rumput laut
12.	Mendesain tata ruang wilayah pesisir dan laut	38 lokasi laut dengan dokumen rencana zonasi 11 PPKT dan 10 kawasan strategis nasional dengan dokumen Masterplan Pengembangan Pesisir dan Pulau2 Kecil
13.	Peningkatan produksi perikanan (40-50 juta ton per tahun di 2019)	29,51 juta ton (t.d: Ikan tangkap 6,45 juta ton, ikan budidaya 8,35 juta ton, rumput laut 11,11 juta ton, garam 3,6 juta ton)
14.	Pelabuhan dan armada perintis	Pengembangan pelabuhan pada 24 lokasi untuk tol laut serta penyediaan kapal perintis

Unit Penanggung Jawab

Deputi Penanggung Jawab: Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

No	Sasaran Nawacita hingga 2019	Target 2016
1.	Pemberian akses modal, sarpro, infrastruktur, teknologi dan pasar	Direktorat Kelautan dan Perikanan
2.	Pembangunan 100 sentra perikanan	Direktorat Kelautan dan Perikanan
3.	Pembangunan 24 pelabuhan perikanan strategis	Direktorat Kelautan dan Perikanan
4.	Pemberantasan <i>illegal unregulated, unreported fishing</i>	- Direktorat Kelautan dan Perikanan - Direktorat Pertahanan dan Keamanan
5.	Penurunan intensitas penangkapan di kawasan <i>overfishing</i>	Direktorat Kelautan dan Perikanan
6.	Keamanan laut, daerah perbatasan	Direktorat Pertahanan dan Keamanan
7.	Pengamanan SDA dan ZEE	Direktorat Kelautan dan Perikanan
8.	Kawasan konservasi perairan berkelanjutan 17 juta ha	- Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air - Direktorat Kelautan dan Perikanan
9.	Penambahan kawasan konservasi 700 ha	Direktorat Kelautan dan Perikanan
10.	Rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir	- Direktorat Kelautan dan Perikanan - Direktorat Lingkungan Hidup
11.	<i>Best aqua-culture practices</i> untuk komoditas unggulan	Direktorat Kelautan dan Perikanan
12.	Mendesain tata ruang wilayah pesisir dan laut	- Direktorat Kelautan dan Perikanan - Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan
13.	Peningkatan produksi perikanan (40-50 juta ton pertahun di 2019)	Direktorat Kelautan dan Perikanan
14.	Pelabuhan dan armada perintis	Direktorat Transportasi

Forum Kemaritiman

No	Sasaran Nawacita	Kementerian/Lembaga								
		KKP	Koprasi/UKM	PU	Perhub	Ristek	Perdag	LH & Hut	Agraria & TTR	Hukum HAM, Kemenhan
1.	Pemberian akses modal, sarpro, infrastruktur, teknologi dan pasar									
2.	Pembangunan 100 sentra perikanan									
3.	Pembangunan 24 pelabuhan strategis									
4.	Pemberantasan <i>illegal, unregulated, unreported fishing</i>									
5.	Penurunan intensitas penangkapan di kawasan <i>overfishing</i>									
6.	Keamanan laut, daerah perbatasan									
7.	Pengamanan SDA dan ZEE									
8.	Kawasan konservasi perairan berkelanjutan 17 juta ha									
9.	Penambahan kawasan konservasi 700 ha									
10.	Rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir									
11.	Best aqua-culture practices untuk komoditas unggulan									
12.	Mendesain tata ruang wilayah pesisir dan laut									
13.	Peningkatan produksi perikanan (40-50 juta ton pertahun di 2019)									
14.	Pelabuhan dan armada perintis									

Koordinasi Lintas Sektoral



Koordinasi Lintas Sektoral

No	Kegiatan Strategis	Penanggung Jawab															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Koordinasi Perencanaan																
2.	Koordinasi Pelaksanaan																
3.	Desain tata ruang wilayah pesisir dan lautan yg mendukung kinerja pembangunan maritim dan perikanan																
4.	Peningkatan produksi perikanan dua kali lipat (40-50 juta ton per tahun pada thn 2019																
5.	Peningkatan kapasitas dan pemberian akses terhadap sumber modal, sarana produksi, infrastruktur, teknologi dan pasar																
6.	Pembangunan 100 sentra perikanan sbg tempat pelelangan ikan terpadu dan pembangunan 24 pelabuhan strategis																
7.	Pemberantasan <i>Illegal, Unregulated</i> dan <i>Unreported Fishing</i> (IUU)																
8.	Mengurangi intensitas penangkapan di kawasan <i>underfishing</i> sesuai batas kelestarian																
9.	Penguatan keamanan laut, daerah perbatasan dan pengamanan SDA dan ZEE																
10.	Peningkatan luas kawasan konservasi perairan berkelanjutan (17 juta ha) dan penambahan kawasan konservasi 700 ha dan rehab. Kerusakan lingkungan pesisir & laut																
11.	Penerapan <i>Best Aqua-culture Practices</i> untuk komoditas-komoditas unggulan																

Keterangan:

1. Bappenas	5. Kemen Ristek DIKTI	9. Kemen Hub	13. Kemen BUMN
2. Kemenko Kemaritiman	6. Kemen LH & Hut	10. KemenLu	14. Kemen Kum HAM
3. Kemen KP	7. Kemen Han	11. Kemen Kop UKM	15. Pemda
4. Kemen Agraria & TTR	8. Kemen Dagri	12. Kemen PU	16. Polri

Contoh Tabel Kontribusi Kegiatan K/L

AGENDA NAWACITA
SUB AGENDA PRIORITAS
TAHUN

: VII. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK
: MARITIM
: 2016

KETUA FORUM
OBSERVER

: DEPUTI SDA DAN LINGKUNGAN
: 1. KEMENTERIAN PEREKONOMIAN/KEMARITIMAN
2. KANTOR STAF PRESIDEN

Sasaran per K/L pelaksana

NO	SASARAN NAWACITA	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET 2016	INDIKATOR KEGIATAN	ALOKASI 2016 (RP MILIAR)
2.	Peningkatan produksi perikanan (40-50 juta ton pertahun di 2019)	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Program Pengembangan SDM Kelautan Dan Perikanan	Pelatihan Kelautan dan Perikanan	15000	Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan lulusan pelatihan yang kompeten	94,22
				Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	55000	Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh (kelompok)	47,5
					13100	Jumlah penyuluh perikanan yang melakukan penyuluhan KP (orang)	
				Pendidikan Kelautan dan Perikanan	6500	Jumlah peserta didik pada satuan pendidikan KKP sistem vokasi yang kompeten	198,69
					14	Jumlah satuan pendidikan KP yang terakreditasi sesuai standar	
			Program Pengembangan Dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	10	Jumlah kapal >30 GT yang terbangun (unit)	64,55
					37	Jumlah kapal 10-30 GT yang terbangun (unit)	
5.	Pengamanan SDA dan ZEE	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	500	Jumlah Pulau kecil yang divalidasi pembakuan namanya (pulau)	4,08
				Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	19	Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang difasilitasi pengembangan ekonominya (pulau)	139,13
					20	Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) tidak berpenduduk yang dikelola (pulau)	15,04
		Kementerian Luar Negeri	Program Optimalisasi Terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan dan Kelautan	75%	Persentase jumlah perundingan yang berhasil diselenggarakan dalam rangka upaya penyelesaian penetapan batas wilayah di laut serta penegakan batas wilayah di darat.	19,1
		Kementerian Dalam Negeri	Program Penguatan Pemerintahan Umum	Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan	35 rumusan kebijakan	Jumlah rumusan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan dan toponomi	
		Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	Program Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan di Laut	Peningkatan Operasi Bersama Keamanan Laut	12	Jumlah penyelenggaraan kegiatan operasi keamanan laut secara bersama di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia	
					1	Jumlah operasi keamanan laut secara terintegrasi	
				Koordinasi Pengawasan Keamanan Laut	7	Jumlah pengadaan kapal patroli baru beserta peralatan pendukungnya (EWS/SPD)	

Contoh Tabel Target Nawacita Per Provinsi

AGENDA NAWACITA

: VII. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK

SUB AGENDA PRIORITAS
KEMENTERIAN/LEMBAGA
PROGRAM STRATEGIS

: MARITIM
: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

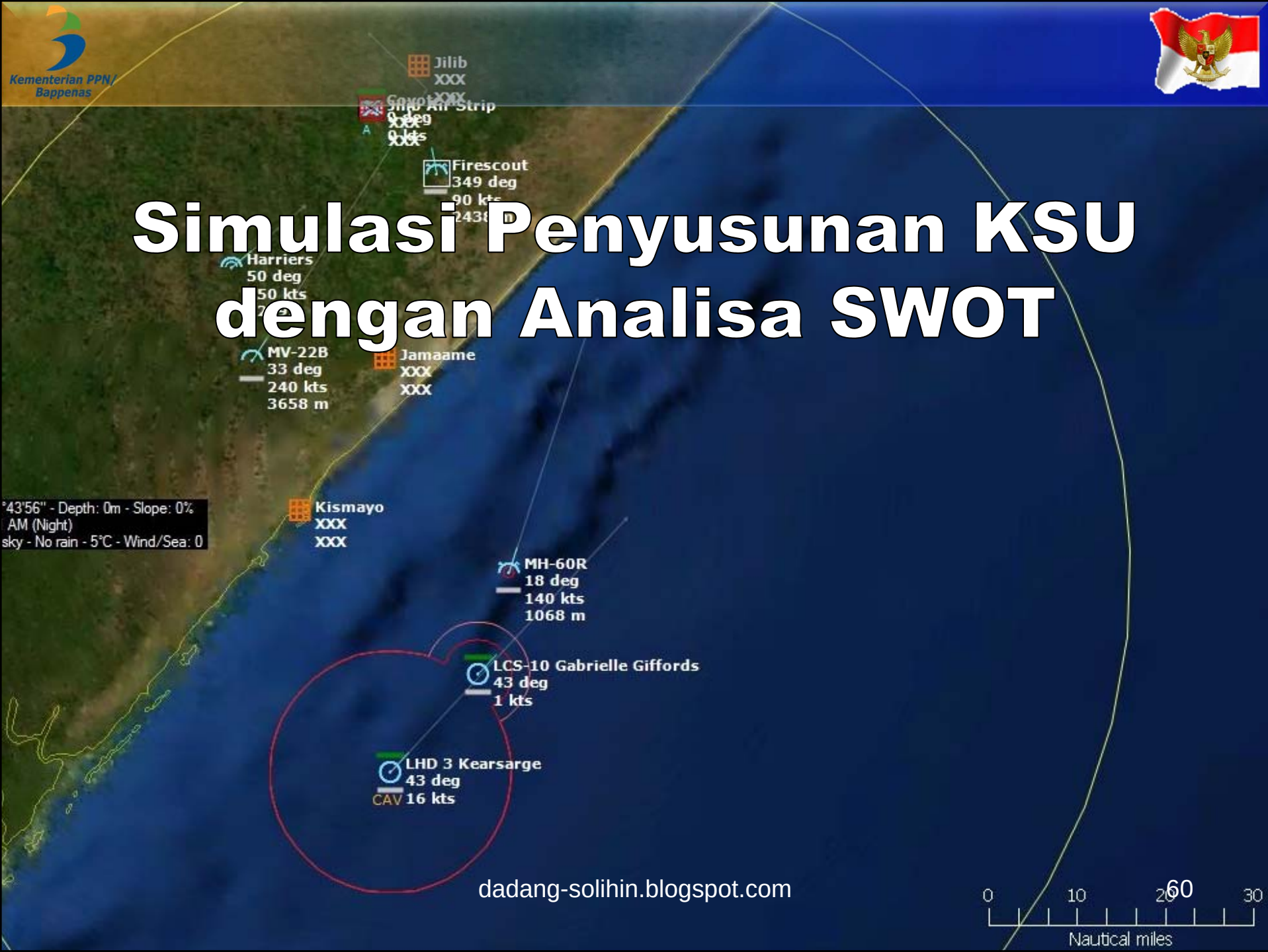
KEGIATAN STRATEGIS

: -

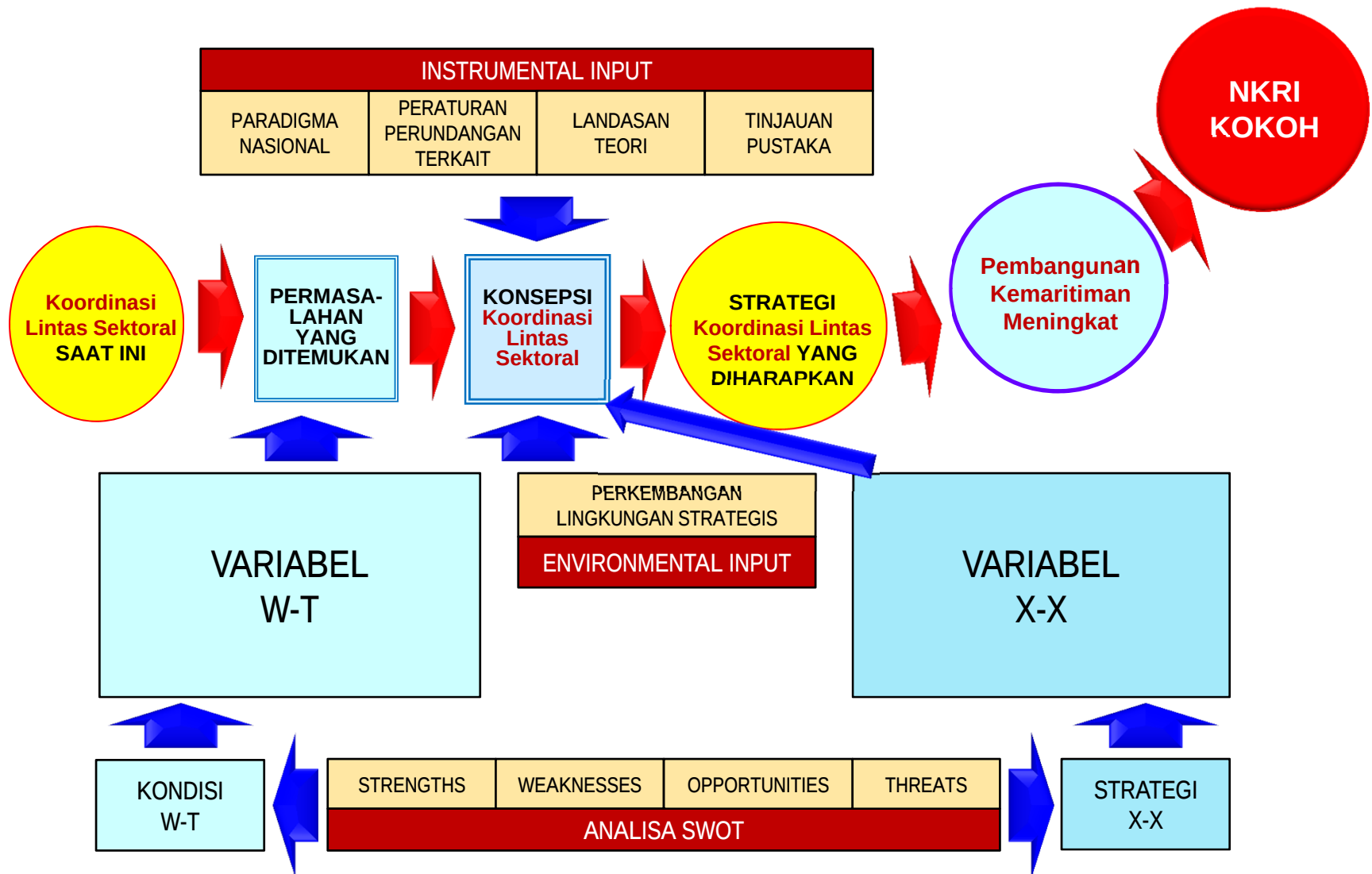
: -

Sasaran per K/L Provinsi

NO	SASARAN NAWACITA	PROVINSI	TARGET 2016	ALOKASI 2016 (Rp Miliar)
1.	Pemberian akses modal, sarpro, infrastruktur, teknologi dan pasar	34 provinsi Technopark: Aceh, Sumatera Barat, Kepri, Bangka Belitung, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, Gorontalo		
2	Peningkatan produksi perikanan (40-50 juta ton pertahun di 2019)	34 provinsi		
	Pembangunan 100 sentra perikanan	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Riau, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, NTT, NTB, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat	20 sentra perikanan terpadu	
	Best aqua-culture practices untuk komoditas unggulan	34 provinsi		
3	Pembangunan 24 pelabuhan perikanan strategis	Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara	22	
4	Pemberantasan illegal, unregulated, unreported fishing	Nasional (11 Wilayah Pengelolaan Perairan/WPPP)		
	Penurunan peningkatan di kawasan overfishing			
	Keamanan laut, daerah perbatasan			
5	Pengamanan SDA dan ZEE	Bengkulu, NTT, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Papua	- 500 pulau kecil yang divalidasi namanya - 19 PPKT yang difasilitasi pengembangan ekonominya -20 PPKT tidak berpenduduk yang dikelola	
6	Kawasan konservasi perairan berkelanjutan 20 juta ha		17,1 ha kawasan konservasi perairan	
	Penambahan kawasan konservasi 700 ha			
7	Rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir	Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur		
8	Mendesain tata ruang wilayah pesisir dan laut			

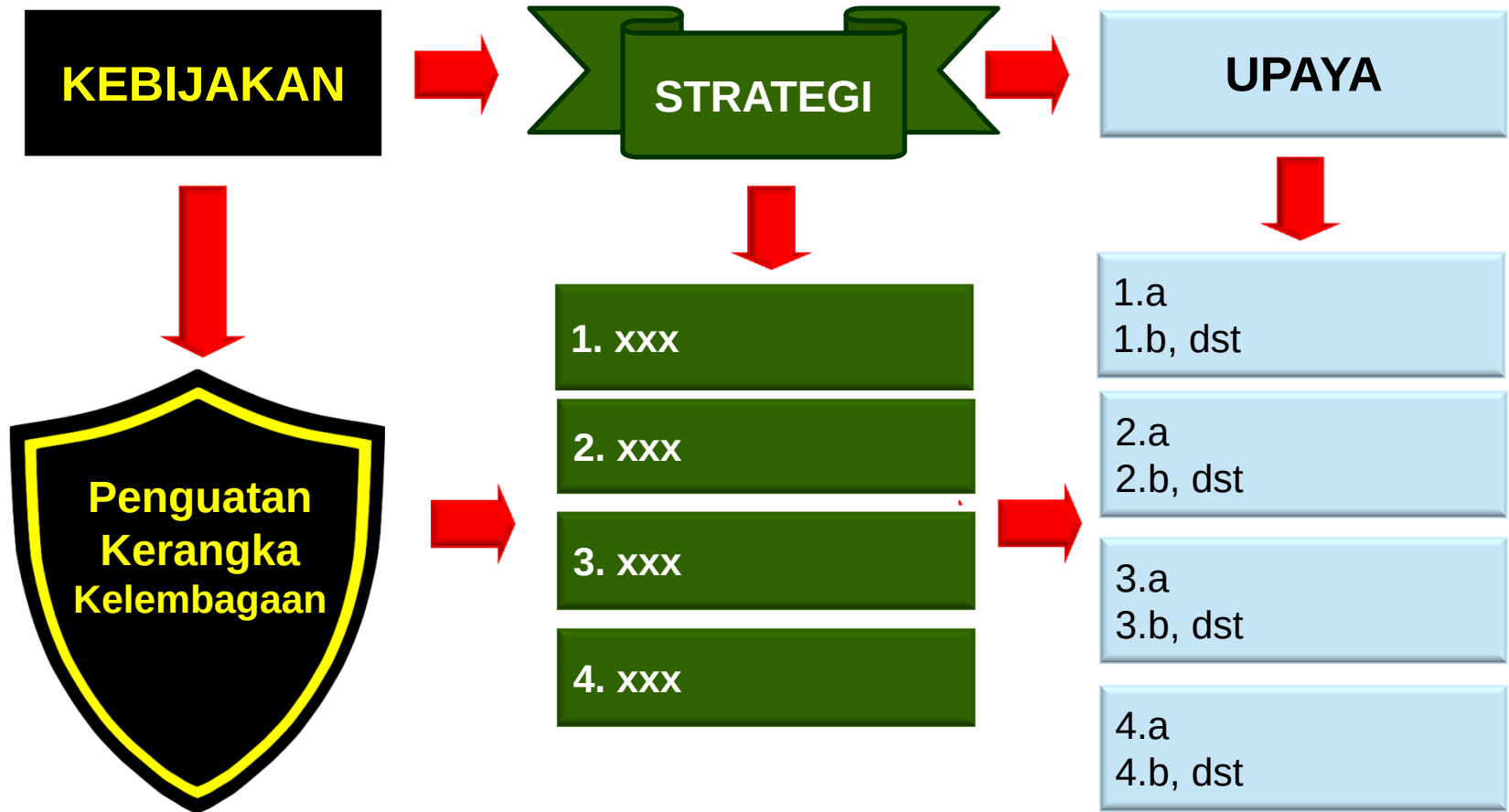


ALUR PIKIR Koordinasi Lintas Sektoral dalam Mendukung Pembangunan Kemaritiman



Analisis SWOT

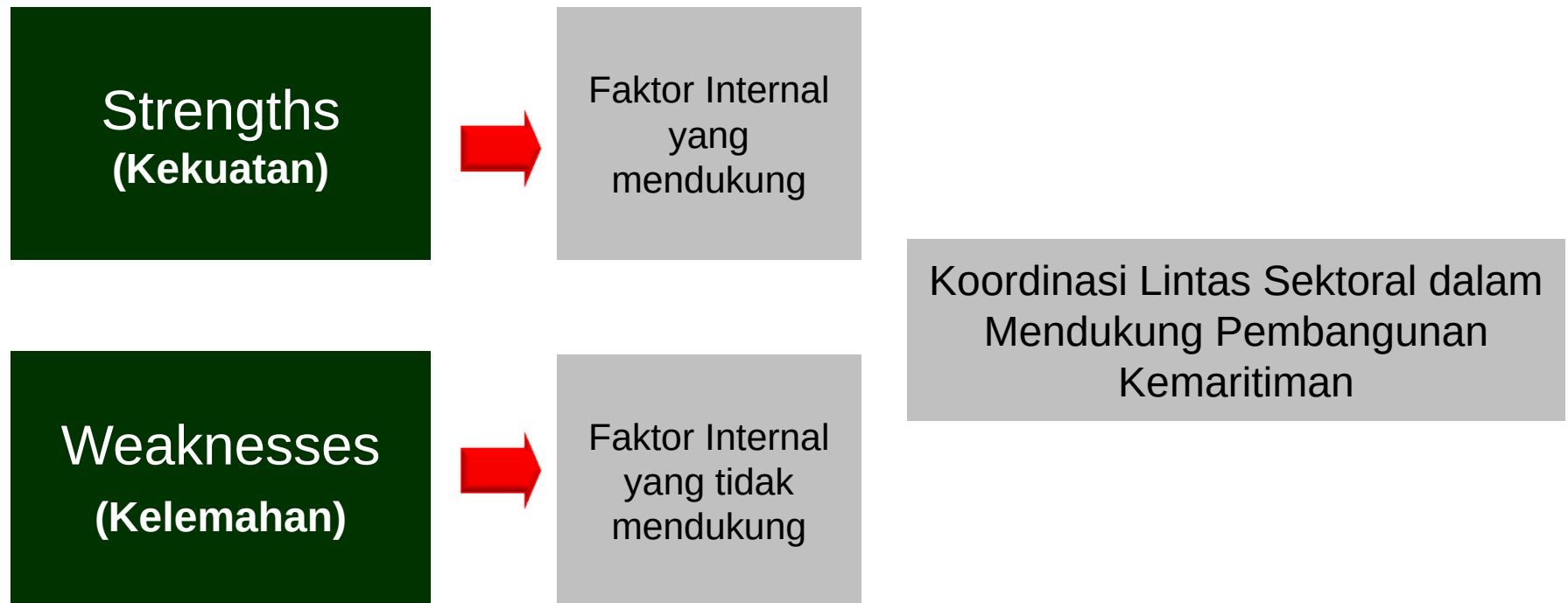




Analisis SWOT

INTERNAL EKSTERNAL	Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
	Strategi SO Gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi WO Atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang
Opportunities (Peluang)	Strategi ST Gunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman	Strategi WT Minimalkan kelemahan dan hindari ancaman
Threats (Ancaman)		

Identifikasi Faktor Internal



Strengths (Kekuatan)

No	Strength (Kekuatan)	NU	BF	NUxBF
1	SDM K/L yang berkualitas	2	10	20
2	Komitmen pimpinan	4	30	120
3	Adanya Regulasi, tertuang di RPJMN, sikap politik, visi yang jelas	5	40	200
4	Adanya lembaga Menko Kemaritiman, tupoksinya jelas	3	15	45
5	Anggaran yang memadai	1	5	5
	Jumlah		100	390

Weaknesses (Kelemahan)

No	Weaknesses (Kelemahan)	NU	BF	NUxBF
1	Rendahnya koordinasi lintas K/L/D, partisipasi masyarakat, rendahnya tata kelola	5	30	150
2	Terbatasnya infrastruktur, wilayah terlalu luas	3	20	60
3	Lemahnya penegakan hukum, maraknya praktek KKN	4	25	100
4	Rendahnya budaya maritim	2	15	30
5	Rendahnya alokasi anggaran yang tidak terkonsentrasi secara optimal	1	10	10
	Jumlah		100	350

Identifikasi Faktor Eksternal

**Opportunities
(Peluang)**



Faktor
Eksternal yang
memberikan
manfaat dalam

**Threats
(Ancaman)**



Faktor
Eksternal yang
menghalangi

Koordinasi Lintas Sektoral dalam
Mendukung Pembangunan
Kemaritiman

Opportunities (Peluang)

No	Opportunities (Peluang)	NU	BF	NUxBF
1	Potensi SKA Kemaritiman yang melimpah	5	40	200
2	Posisi geografis yang strategis	4	30	120
3	Adanya bonus demografi tahun 2030	1	5	5
4	Potensi pasar yang melimpah	3	15	45
5	Adanya dukungan keamanan regional, kepentingan bersama di kawasan	2	10	20
	Jumlah		100	390

Threats (Ancaman)

No	Threats (Ancaman)	NU	BF	NUxBF
1	Maraknya berbagai kegiatan illegal transnasional	4	30	120
2	Banyaknya bencana alam, adanya <i>climate change</i>	2	10	20
3	Adanya kepentingan internasional dan regional, konflik perbatasan, banyaknya tenaga kerja asing	5	40	200
4	Adanya pengaruh budaya luar yang melemahkan budaya maritim	3	15	45
5	Adanya disparitas harga komoditi perikanan	1	5	5
	Jumlah		100	390 ₇₀

Permasalahan yang Ditemukan: Kondisi WT

Weaknesses

1. Rendahnya koordinasi lintas K/L/D, partisipasi masyarakat, rendahnya tata kelola
2. Terbatasnya infrastruktur, wilayah terlalu luas
3. Lemahnya penegakan hukum, maraknya praktek KKN
4. Rendahnya budaya maritim
5. Rendahnya alokasi anggaran yang tidak terkonsentrasi secara optimal

Threats

1. Maraknya berbagai kegiatan illegal transnasional
2. Banyaknya bencana alam, adanya *climate change*
3. Adanya kepentingan internasional dan regional, konflik perbatasan, banyaknya tenaga kerja asing
4. Adanya pengaruh budaya luar yang melemahkan budaya maritim
5. Adanya disparitas harga komoditi perikanan

Strategi Apa sebagai Konsep Koordinasi Lintas Sektoral?

1. Strategi SO $\rightarrow S + O = xxx + xxx = xxx$

2. Strategi WO $\rightarrow W + O = xxx + xxx = xxx$

3. Strategi ST $\rightarrow S + T = xxx + xxx = xxx$

4. Strategi WT $\rightarrow W + T = xxx + xxx = xxx$

Strategi Apa sebagai Konsepsi Koordinasi Lintas Sektoral?

- | | |
|----------------|---|
| 1. Strategi SO | Gunakan Kekuatan untuk memanfaatkan Peluang |
| 2. Strategi WO | Atasi Kelemahan dengan memanfaatkan Peluang |
| 3. Strategi ST | Gunakan Kekuatan untuk menghindari atau mengatasi Ancaman |
| 4. Strategi WT | Minimalkan Kelemahan dan hindari Ancaman |

Kesimpulan: Strategi Terpilih S-O

1. SDM K/L yang berkualitas
2. Komitmen pimpinan
3. Adanya Regulasi, tertuang di RPJMN, sikap politik, visi yang jelas
4. Adanya lembaga Menko Kemaritiman, tupoksinya jelas
5. Anggaran yang memadai

1. Potensi SKA Kemaritiman yang melimpah
2. Posisi geografis yang strategis
3. Adanya bonus demografi tahun 2030
4. Potensi pasar yang melimpah
5. Adanya dukungan keamanan regional, kepentingan bersama di kawasan

Koordinasi Lintas Sektoral yang Diharapkan

1. SDM K/L yang berkualitas
2. Komitmen pimpinan
3. Adanya Regulasi, tertuang di RPJMN, sikap politik, visi yang jelas
4. Adanya lembaga Menko Kemaritiman, tupoksinya jelas
5. Anggaran yang memadai
6. Potensi SKA Kemaritiman yang melimpah
7. Posisi geografis yang strategis
8. Adanya bonus demografi tahun 2030
9. Potensi pasar yang melimpah
10. Adanya dukungan keamanan regional, kepentingan bersama di kawasan



Terima Kasih